



BPK RI Serahkan LHP dalam Implementasi SAP Berbasis Akruial

Andika Lay
Harian Borneo, Pontianak

BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Jumat (6/11) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akruial TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten Kubu Raya dan LHP atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Parpol TA 2014 pada Pemerintah Daerah se-Kalbar.

Penyerahan LHP ini berlangsung di auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalbar dengan tamu undangan para kepala daerah, Ketua DPRD, dan Inspektur, serta dihadiri juga oleh Kepala Kesbangpol dan kepala DPKAD dari seluruh entitas di Kalbar. Selain itu, turut diundang pula Kepala Perwakilan BPKP Provinsi kalbar, Arman Sahri Harahap.

Selain penyerahan LHP disampaikan juga pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akruial TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya oleh Ketua Tim pemeriksa, Viona Natalis Manurung.

Kepala Perwakilan Didi Budi Satrio menyampaikan bahwa tujuan Pemeriksaan Kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruial, yang secara spesifik diarahkan untuk menilai aspek utama yang signifikan dalam



LHP
Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten/Kota usai menerima LHP juga berkesempatan foto bersama Wagub Drs Christiandy Sanjaya, dan Ketua, BPK RI Perwakilan Kalbar. FOTO Andika Lay/Harian Borneo.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruial yang meliputi Aspek Komitmen, Regulasi dan Kebijakan, Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Aset dan TI, serta Aspek Pengelolaan Teknologi Informasi.

BPK juga mengundang entitas di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya (DPKAD) terkait hasil pemeriksaan kinerja yang sudah dilaksanakan, dengan harapan agar hasil pemeriksaan ini dapat dijadikan masukan untuk pemerintah daerah yang lain untuk mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan penerapan Sistem Akruial Basis yang harus dilaksanakan dalam menyusun LKPD Tahun 2015.

"BPK berharap entitas pemeriksaan yang lain bersungguh-sungguh untuk mau segera memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam menerapkan Akruial Basis. Terkait dengan kehadiran

Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Barat, beliau segera diundang dengan tujuan agar seluruh instansi pemerintah daerah bersinergi dan BPK berharap BPKP berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pendampingan dalam menyusun LKPD TA 2015," kata Didi Budi Satrio.

Kepala Perwakilan juga menyampaikan bahwa Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik ini memiliki lingkup yang terbatas dan menggunakan prosedur analitis. Oleh karena itu kesimpulan yang BPK berikan hanya atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Dana APBD TA 2014. Adapun penyampaian laporan kepada masing-masing DPC/DPW/DPD Partai Politik di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi kami serahkan kepada Badan/Kantor Kesbangpol/Kesbangpollinmas untuk mendistribusikannya.

Ditambahkan, bahwa sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik mensyaratkan bahwa, partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya satu bulan setelah berakhirnya

tahun anggaran.

"BPK tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap partai politik tersebut, dengan konsekuensi untuk tahun berjalan bantuan kepada partai politik tersebut akan dihentikan sementara. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik khususnya Pasal 12 A antara lain menyebutkan Partai Politik wajib menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK paling lambat satu bulan sesudah tahun anggaran berakhir. Mohon hal ini disampaikan kepada Partai Politik di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi," ingatnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM Kabupaten Kubu Raya, Suprpto. Acara dilanjutkan dengan pemaparan/presentasi hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akruial TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya yang telah dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa dan diakhiri dengan sesi foto bersama.